



FORUM
KAJIAN
ANTROPOLOGI
INDONESIA

FKAI

Untuk Indonesia yang Multikultural

**KOENTJARANINGRAT
MEMORIAL LECTURES XIII-2017**



**KEMAJEMUKAN
DAN
KEADILAN**

**Kamis, 9 Februari 2017
Auditorium Museum Nasional, Jakarta**



Sifat mental kita yang bersifat positif adalah sikap toleran terhadap pendirian-pendirian lain. Sifat mental ini amat penting diwariskan kepada anak-anak kita, demi kebahagiaan mereka di masa datang, apabila mereka hidup dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat bangsa Indonesia ini..." (Koentjaraningrat)

SUSUNAN ACARA

08:30 – 09:00 Pendaftaran

Pembukaan

09:00 – 09:10 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

09:10 – 09:20 Sambutan Pembina Forum Kajian Antropologi Indonesia
Nurmala Kartini Sjahrir

09:20 – 09:30 Pidato Pembuka oleh Kepala Staf Kepresidenan RI
Teten Masduki

Kuliah Umum

09:30 – 10:00 **Keynote Speech “Kemajemukan dan Keadilan”**
Hilmar Farid, Ph.D.

10:00 – 10:10 Moderator memulai sesi pertama

10:10 – 10:40 **Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia**
Prof. Herawati Supolo-Sudoyo, Ph.D.

10:40 – 11:00 **Pancasila: Ideologi Inklusif bagi Kemajemukan Indonesia**
Yudi Latif, Ph.D.

11:00 – 11:15 **Kesenjangan dan Kebencian dalam Relasi
antar-Kelompok di Indonesia**
Geger Riyanto, MA.

11:15 – 12:15 Tanya jawab dan diskusi

12:15 – 12:30 Rumusan oleh Iwan M. Pirous, MA.

12:30 – 12:35 Penutupan oleh pembawa acara

12:35 – 14:00 Makan siang

SEKAPUR SIRIH

Sejak akhir tahun 2016 lalu dinamika sosial di Tanah Air berkembang ke arah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Muncul ke permukaan sebuah gerakan sosial-politik yang, akibat pembiaran, tiba-tiba telah membesar dan mulai menyeret bangsa ini menjauh dari ideologi Pancasila dan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan mewujud dalam bentuk aksi unjuk rasa, yang menjadi setiap hak warga di negara demokrasi seperti Indonesia.

Sebelum maupun setelah aksi unjuk rasa, di berbagai daerah juga terjadi sejumlah tindakan kekerasan dan pemaksaan. Berbagai pihak menengarai, menguatnya sentimen primordial, sektarian dalam kehidupan yang tidak toleran pada perbedaan.

Kita dibiasakan untuk mengidentikkan kemajemukan dengan kerukunan, harmoni, persatuan. Pada kenyataannya, kemajemukan Indonesia merupakan produk dari kesinambungan sejarah yang tak luput dari dinamika ekonomi dan politik. Berbagai pihak serta kelompok berusaha meniti kehidupan di atasnya dan perjumpaan di antara mereka, kendati merupakan potensi, menyebabkannya rentan pula dengan konflik, perebutan, dominasi satu terhadap yang lain.

Koentjaraningrat Memorial Lectures kali ini tidak diadakan untuk secara langsung merespons berkembang ekstremisme dan intoleransi, fenomena sosial-budaya yang memunculkan kecemasan banyak pihak, termasuk para antropolog Indonesia. Tumbuh suburnya ekstremisme dan intoleransi dianggap sebagai indikasi kian menguatnya semangat penyeragaman sekaligus menggerus semangat sekebinekaan yang telah disepakati dan selalau digelorakan para bapak bangsa.

Kuliah umum ini lebih bertujuan untuk menyadarkan kembali kita semua akan takdir kebinekaan kita. Juga untuk menyegarkan kembali ingatan pada Pancasila dan semboyan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda Namun Satu Jua". Mungkin kini sudah saatnya Pancasila ditafsir ulang, diajarkan, dan dihayati dengan cara yang lebih baik dan benar.

Kuliah dan diskusi ini pun diselenggarakan untuk mengingatkan bahwa kebinekaan bangsa tidak selalu identik dengan kehidupan yang rukun, bersatu, dan harmonis seperti yang kerap dibayangkan. Hadirnya keadilan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat majemuk yang bersatu dalam kedamaian dan keselarasan.

Koentjaraningrat Memorial Lectures merupakan agenda kegiatan tahunan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) sejak awal pendiriannya, 2004. Diselenggarakan untuk menghormati dan memperingati jasa-jasa almarhum Prof Dr Koentjaraningrat, bapak antropologi Indonesia. FKAI adalah yayasan yang didirikan sejumlah antropolog dan bertujuan untuk ikut mengembangkan antropologi di luar dunia perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pemerintah serta memperjuangkan terciptanya bangsa Indonesia yang majemuk, adil, dan makmur.

Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017

Mulyawan Karim

Ketua Forum Kajian Antropologi Indonesia

Kemajemukan dan Keadilan

Hilmar Farid, Ph.D.

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Multikulturalisme Secara Global

Di ranah kebijakan publik, multikulturalisme lazimnya diterjemahkan sebagai himpunan kebijakan yang memprioritaskan pengakuan pada kemajemukan budaya yang ada di masyarakat. Sejumlah kebijakan dapat disebut sebagai ilustrasi:

- o Pengakuan publik pada keragaman budaya minoritas melalui fasilitasi komunitas budaya minoritas dan konsultasi dengan lembaga budaya minoritas
- o Penyusunan kurikulum yang mencantumkan materi tentang budaya minoritas
- o Penggunaan banyak bahasa (dari berbagai kelompok budaya dalam masyarakat) dalam penyampaian informasi penting negara
- o Pencantuman keterangan terkait aturan adat dan agama atas komoditas tertentu (misalnya label halal, vegetarian, dll)

Di sejumlah negara Eropa, multikulturalisme sebagai paradigma politik yang berfokus pada kemajemukan budaya dianggap telah gagal sejak peralihan abad ke-21. Pada 7 Juli 2006, tepat satu tahun peringatan pembomban London, surat kabar *Daily Mails* mencantumkan *headline*: "Multikulturalisme sudah mati". Pada tahun 2010, Angela Merkel menyatakan bahwa politik "multi-kulti" sudah gagal di Jerman karena hanya mempertajam pertentangan budaya antara warga asli Jerman dan kaum imigran sehingga satu-satunya solusi yang masuk akal saat ini ialah integrasi budaya imigran ke dalam budaya Jerman. Integrasionisme semacam ini muncul di berbagai negara Eropa, bebarengan dengan menguatnya sentimen nasionalisme yang xenofobik. Hari ini, sebagian negara Eropa dihantui oleh ancaman nyata politik ultra-konservatif yang mempersepsi kebijakan pro-kemajemukan budaya sebagai lahan subur bagi pembiakan terorisme.

Dari Multikulturalisme Kolonial ke Kolonialisme Multikultural

Di Indonesia sendiri, politik kemajemukan budaya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era kolonial. Kolonialisme Belanda dibangun di atas dasar pertimbangan yang kita dewasa ini akan kategorikan sebagai kebijakan multikultural. Kita dapat merujuk pada kajian sejarah legal Profesor Soetandyo Wignjosebroto (*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*; Van Vollenhoven Institute, 2014) untuk mengidentifikasi beberapa fase dalam perkembangan politik multikultural kolonial di Indonesia:

- o Fase awal (dari era VOC sampai 1870). Sejak VOC membuka kantor di Batavia dan Ambon, kepentingan awalnya bukanlah mengembangkan kekuasaan politik, melainkan kepentingan dagang dan penguasaan akses ke sumber daya alam. Oleh karenanya, VOC tidak berkepentingan untuk menyeragamkan atau menyatukan kemajemukan hukum adat masyarakat Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda pun meneruskan pendekatan semacam itu. Hal ini nampak dalam *Regeringsreglement 1854* Pasal 75 Ayat 3 yang menyatakan bahwa untuk orang-orang pribumi akan diterapkan hukum agama, pranata-pranata dan kebiasaan orang-orang pribumi” (*de godsdienstige wetten, instellingen en gebriuken der Inlanders*). Inilah akar dari “multikulturalisme kolonial” .
- o Fase tengah (dari 1870 sampai 1910). Pluralisme hukum itu mengalami perubahan arah pada tahun 1870. *Regeringsreglement 1854* mencantumkan pasal tentang kemungkinan diberlakukannya *toepasselijkverklaring* (penerapan hukum Belanda untuk orang-orang pribumi). Kemungkinan itu ditindaklanjuti menjadi hukum khusus untuk orang-orang pribumi melalui pengesahan *Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders* pada tahun 1870. Di dalamnya, antara lain, diatur tentang kewajiban para pekerja pribumi yang mengikat kontrak dengan majikan Belanda. Pada tahun yang sama diundangkan pula *Agrarisch Wet* yang memperkenalkan sistem hak milik (*eigendom*) dan hak guna usaha (*erfpacht*). Baik hukum yang mengatur ketenaga-kerjaan dan pertanahan ini bertentangan dengan kemajemukan pranata adat. Sebagai ganti kerja-wajib, Belanda mengenalkan kerja-upahan; sebagai ganti tanah-adat yang dikelola secara komunal, Belanda mengenalkan tanah swasta. Kendati begitu, sebagian besar pranata adat yang tidak mengganggu jalannya liberalisasi dibiarkan bertahan.

- o Fase akhir (dari 1910 sampai 1942). Usaha untuk mengunifikasi hukum Hindia-Belanda tetaplah berlangsung setengah-setengah karena kebijakan pengakuan pada kemajemukan budaya dan pranata adat kaum pribumi masih diadopsi Belanda. Pengakuan itu justru mendapat angin dengan upaya kodifikasi hukum adat yang dibuat van Vollenhoven dalam kitab kompilasi hukum adat terlengkap yang disusunnya pada tahun 1910, yakni *Adatwetboekje voor heel Indie*. Pengakuan pada kemajemukan hukum adat (seperti dikodifikasi van Vollenhoven) dan otoritasnya untuk menentukan putusan hukum diterima pada dekade 1920-an dan bertahan sampai dengan kedatangan Jepang di tahun 1942. Dengan begitu, Belanda mengkonsolidasikan Hindia-Belanda ke arah “kolonialisme multikultural” .

Dari uraian sejarah ini, nampak bahwa kolonialisme Belanda di Indonesia tidak asing dari kebijakan multikultural. Yang terjadi justru pemanfaatan multikulturalisme untuk tujuan kolonial. Dalam hal itu, kita dapat memotret keseluruhan proses kolonisasi sejak VOC sampai jatuhnya pemerintahan Hindia-Belanda sebagai proses peralihan dari *multikulturalisme kolonial ke kolonialisme multikultural*. Artinya, peralihan dari kebijakan kolonial yang membiarkan kemajemukan budaya Nusantara asal tidak mengganggu perdagangan ke kebijakan kolonial yang secara aktif memanfaatkan kemajemukan budaya untuk mengkonsolidasi rezim kolonial.

- o Perlu diingat bahwa van Vollenhoven sendiri terinspirasi dari kajian antropologi Snouck Hurgronje, *De Atjehers* (1893), yang memperkenalkan untuk pertamakalinya istilah *Adatrecht*. Snouck Hurgronje, pada gilirannya, menuliskan kajian itu dalam rangka mencari solusi kultural untuk penundukan militer atas Aceh yang telah memakan biaya teramat besar, seperti halnya Perang Diponegoro yang hampir membikin Belanda kolaps secara ekonomi. Jadi, dari situ dapat dibaca bahwa upaya van Vollenhoven mengkodifikasi hukum adat dan mendorong pengakuan atasnya adalah tawaran solusi untuk konsolidasi kolonialisme yang lebih stabil dan murah. Dengan kata lain, tawaran untuk sebuah *kolonialisme multikultural*.

Jadi multikulturalisme dan kemajemukan tidak seharusnya dipersepsi secara lugu sebagai cita-cita tatanan sosial-budaya yang serba harmonis dan serba-baik. Multikulturalisme dan kemajemukan selalu merupakan bagian dari suatu proyek politik dan ekonomi. Evaluasi tentang baik/buruknya suatu kebijakan multikultural, karenanya, mesti berangkat dengan evaluasi tentang proyek politik dan ekonomi yang diusungnya.

Keadilan dan Akar Ekonomi-Politik Kemajemukan

Dari uraian sejarah di muka, nampak pula akar ekonomi-politik dari multikulturalisme dan semua diskursus (baik pro- maupun kontra-) kemajemukan. Dalam situasi kekinian, akar ekonomi-politik itu juga dapat kita temukan dalam gejala sektarianisme dan fanatisisme golongan. Ada beberapa kasus yang dapat dikomentari di sini:

- o Sektarianisme dan fanatisisme religius di kalangan kaum miskin perkotaan. Kesenjangan ekonomi yang begitu tajam memicu tumbuhnya harapan akan keadilan Ilahi. Itulah yang menyebabkan mengapa kaum miskin kota dengan cepat mengalami radikalisisasi oleh isu agama.
- o Sektarianisme primordial dan puritanisme religius di kalangan kelas menengah atas perkotaan. Persaingan kerja dan alienasi sosial akibat kapitalisme *high tech* memicu tumbuhnya kebutuhan atas identitas primordial dan cara beragama yang *zakelijk*. Inilah yang menyebabkan mengapa kelas sosial yang mapan justru menjadi pelaku utama sektarianisme dan puritanisme.
- o Sentimen rasis dan merebaknya kontroversi tentang isu “invasi pekerja Cina” yang begitu cepat diyakini orang-orang. Sumber sesungguhnya terletak ketidakpastian kerja yang merupakan konsekuensi logis dari fleksibilitas pasar tenaga kerja yang diakibatkan oleh kebijakan neoliberal global.

Masalah yang memicu tumbuhnya kebutuhan bagi politik multikulturalis, karenanya, adalah masalah ekonomi-politik. Baik politik identitas maupun solusi multikulturalisnya sama-sama dimungkinkan oleh suatu tata ekonomi-politik yang mengesampingkan keadilan sosial.

Dalam karyanya, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the 'Postsocialist' Condition* (1997), Nancy Fraser membedakan "politik pengakuan" (*politics of recognition*) dan "politik redistribusi" (*politics of redistribution*).

- o Politik pengakuan berurusan dengan masalah identitas, gender dan multikulturalisme. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengakuan sosial-politik berbasis identitas kultural yang mengarah pada harmoni kultural.
- o Politik redistribusi berurusan dengan masalah eksploitasi kerja, ketimpangan akses pada sumber daya dan pertentangan kelas. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali hubungan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan sosial.

Masalah kita adalah bahwa kedua macam politik itu kerap kali ditangani secara terpisah. Seakan-akan budaya dan ekonomi-politik adalah dua ranah yang berdiri sendiri-sendiri. Pembicaraan tentang kemajemukan, karenanya, cenderung dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan.

Politik rekognisi hanya bisa berjalan kalau itu dilangsungkan bebarengan dengan politik redistribusi. Kemajemukan yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila sumber masalah ketidakadilan ekonomi dibereskan terlebih dulu. Hal yang sebaliknya pun terjadi. Penyelesaian atas ketidakadilan ekonomi kerap kali mensyaratkan strategi kebudayaan yang dapat menginisiasi perubahan sosial.

Kemajemukan dan Politik Kebudayaan Nasional

Bagaimana memastikan agar politik rekognisi dan politik redistribusi bisa berjalan seiring dalam konteks keindonesiaan? Kebijakan budaya macam apa yang harus dimajukan agar diskursus kemajemukan tetap tertanam pada upaya besar untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi?

Hal pertama yang perlu diperhatikan ialah *konteks kebangsaan*. Pengakuan pada kemajemukan bukan berarti penerimaan atas semua budaya yang berkembang di Indonesia tanpa *reserve*, melainkan menempatkan kemajemukan budaya tersebut dalam bingkai proyek tanpa akhir untuk membentuk "kebudayaan nasional". Artinya, mesti ada proses seleksi atas keragaman ekspresi budaya yang muncul di Indonesia dalam rangka mengamankan kepentingan nasional untuk memajukan kebudayaan bangsa.

Lalu apa itu kebudayaan nasional? Sekalipun kita bisa berdebat panjang soal itu, kita tentunya dapat sepakat untuk menempatkan Pembukaan UUD 45 sebagai acuan utama kebudayaan nasional. Di sana dinyatakan dengan jelas bahwa Republik Indonesia dibangun di atas ide bersama bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan kolonialisme dalam segala bentuknya harus dihapuskan dari muka bumi.

Perwujudan ideal dari kemerdekaan itu ialah perlindungan atas segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa serta pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 inilah yang tentunya mesti kita jadikan pedoman dalam upaya pemajuan kebudayaan nasional.

Dalam ranah kebijakan budaya, apa yang mesti dilakukan untuk mengupayakan kemajemukan yang berbasis pada keadilan sosial-ekonomi? Ada dua solusi yang saling bertalian:

- o Mendorong perluasan akses dan kesempatan dalam kegiatan dan ekspresi budaya. Dengan cara ini pengakuan pada keragaman identitas budaya diberi ruang dan dijamin kelestariannya.
- o Mendorong kegiatan budaya yang punya unsur pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan. Dengan cara ini akar ketidakadilan yang memicu sektarianisme dibenahi.

PROFIL PEMBICARA



Hilmar Farid dikenal sebagai sejarawan dan aktivis kebudayaan. Pada tahun 1990-an, Hilmar Farid aktif di gerakan pro demokrasi. Ia merupakan salah satu pendiri Jaringan Kerja Budaya, komunitas seniman dan pekerja budaya di awal 1990-an. Selain itu

Hilmar juga mendirikan Institut Sejarah Sosial Indonesia pada tahun 2000. Ia mengajar sejarah dan Kajian budaya di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Indonesia selama beberapa tahun. Ia meraih gelar doktor di bidang kajian budaya di *National University of Singapore* pada 2014 dengan disertasi tentang Pramoedya Ananta Toer berjudul *Rewriting the Nation: Pramoedya and the Politics of Decolonization*. Hilmar Farid terdaftar sebagai anggota aktif pada Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA) dan *Inter-Asia Cultural Studies Society*. Pada 31 Desember 2015, setelah proses yang panjang, ia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

RINGKASAN

Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia

Prof. Herawati Supolo-Sudoyo, Ph.D

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman

Sejarah hunian pertama manusia modern di kepulauan Asia Tenggara masih tetap menjadi topik perdebatan hangat. Dua model telah digunakan untuk menerangkan migrasi berurutan yang membentuk populasi penghuni Asia Tenggara masa kini. Temuan arkeologi menggambarkan bahwa Asia Tenggara mulai dihuni oleh manusia modern sekitar 50-70 ribu tahun yang lalu. Studi genetik yang dilakukan oleh konsorsium HUGO-Pan Asia memperlihatkan bahwa semua populasi Asia Timur maupun Asia Tenggara berasal dari gelombang pertama migrasi “*Out of Africa*” yang menyusuri jalur selatan sekitar 40-60 ribu tahun yang lalu. Sementara itu, model “*Out of Taiwan*” menerangkan bahwa penyebaran penutur bahasa Austronesia terjadi sekitar 5.000–7.000 tahun yang lalu.

Secara geografis, kepulauan Nusantara memiliki peran penting sebagai penghubung daratan Asia dengan Kepulauan Pasifik. Penduduk Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa dan merupakan kediaman bagi 500 populasi etnik dengan budaya yang sangat beragam. Tingginya keragaman bahasa, etnik, dan budaya ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai asal usul manusia Indonesia: Siapakah manusia Indonesia? Darimana asal muasal leluhur manusia Indonesia dan kapan mereka mulai mendiami kawasan ini? Karena kita sangat beranekaragam tetapi juga memiliki persamaan, apakah ada jejak pembauran? Bagaimana pola persebaran manusia modern Indonesia?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan penting itu, kami telah melakukan rekonstruksi dari 50.000 tahun pergerakan populasi manusia Nusantara dalam suatu studi yang melibatkan 70 populasi etnik dari 12 pulau menggunakan penanda DNA. Penanda DNA mitokondria terletak di luar inti dan hanya diturunkan melalui garis ibu (maternal). Hasil studi mtDNA menunjukkan periode hunian awal di kepulauan Nusantara berkisar antara 70-50 ribu tahun lalu. Analisis penanda kromosom Y yang hanya diturunkan dari garis ayah (paternal) memperlihatkan bukti adanya beberapa gelombang migrasi. Kedua penanda genetik ini juga memperlihatkan bukti-bukti adanya pembauran beberapa leluhur genetik. Pembauran makin jelas dengan menggunakan penanda genetik yang ditemukan dalam inti sel, yaitu DNA autosom yang diturunkan dari kedua orang tua. Hasil studi pada populasi etnik yang mendiami Indonesia bagian barat dan timur memperlihatkan gradasi pembauran genetik.

PROFIL PEMBICARA

Herawati Sudoyo pada saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekul Eijkman di Jakarta dan juga staf pengajar di FKUI. Hera mendapatkan anugerah Honorary Associate Professor dari Universitas Sydney, Australia. Ia merupakan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Komisi Ilmu Kedokteran.



Setelah memperoleh gelar dokter dari FKUI, Hera kemudian melanjutkan studinya

dan gelar Magister Sains dari FKUI. Ia dianugerahi gelar PhD dalam bidang Biokimia & Biologi Molekul dengan fokus penelitian penyakit akibat kelainan membran trasduksi energi, atau yang dikenal sebagai mitokondria, dari Universitas Monash, Melbourne, Australia.

Ia melanjutkan ketertarikannya dalam penyakit membran energi transduksi disamping penyakit kompleks dan terkait gaya hidup di Lembaga Eijkman dan memperluas kegiatan riset dalam keanekaragaman genetik dan kaitannya dengan ketahanan maupun kerentanan terhadap penyakit. Kegiatan keanekaragaman genom manusia dan kepakaran dalam penggunaan marka DNA telah menghasilkan pengembangan laboratorium DNA forensik yang ditujukan untuk keperluan pembuktian ilmiah pengungkapan kasus kriminal. Laboratorium forensik telah menjadi bagian jejaring forensik internasional perdagangan manusia dan juga satwa liar.

Herawati merupakan salah satu pemrakarsa Asosiasi Genetika Manusia Asia Pasifik (APSHG), anggota dari berbagai perkumpulan internasional seperti PanAsian SNP Initiative, Organisasi Genom Manusia (HUGO), A-IMBN, Asia - Pacific Biosafety Association dan lain-lainnya. Berbagai penghargaan diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri seperti Toray Award, TWAS Award, Australian Alumni Award for Scientific Research and Innovation; Habibie Award untuk Ilmu Kedokteran dan Teknologi, Wing Kehormatan dari POLRI dan lainnya. Beberapa penghargaan juga diterima atas kegiatannya mempromosikan perempuan dalam bidang sains. Dalam bidang ilmiah, Herawati telah menerbitkan hasil penelitiannya dalam lebih dari 70 publikasi ilmiah internasional yang juga dikomunikasikan dalam berbagai seminar ilmiah maupun publik.

RINGKASAN

Pancasila: Ideologi Inklusif Kemajemukan Indonesia

Yudi Latif, Ph.D.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

The accommodation of difference is the essence of true equality
(Will Kymlicka, 1996)

Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan Indonesia. Toh, meminjam ungkapan Albert Einstein, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam desain penciptaan negeri ini sebagai negeri multikultural. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia sistem pengelolaan yang tepat. Kita juga tidak perlu terobsesi dengan homogenisasi kebangsaan, karena keseragaman bukanlah jaminan kedamaian dan kesejahteraan.

Pada kenyataannya, realitas sejadad kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari satu kelompok etno-kultural. Pada umumnya, negara modern merupakan negara dengan aneka suku-bangsa (polietnik). Bahkan, suatu negara dengan ragam kebangsaan pun hadir di pelbagai belahan dunia. Sehingga yang terakhir ini lebih tepat dikatakan sebagai “nations-state” ketimbang “nation-state” .

PROFIL PEMBICARA



Yudi Latif, adalah Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Jakarta. Menyelesaikan pendidikan doktoralnya dari *The Australian National University*. Salah satu karyanya yang monumental adalah *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (2011). Dalam rangka memperingati 44 tahun *Media Indonesia* (2014), buku ini dinobatkan sebagai salah satu dari 44 buku yang membawa perubahan dan mengubah Indonesia. Pergumulannya dalam pemikiran kebangsaan dan kemanusiaan membuatnya menerima sejumlah penghargaan (*award*): *IFI (Islamic Fair of Indonesia) Award* pada Desember 2011, untuk kategori intelektual muda paling berpengaruh; *Ikon Politik Indonesia* tahun 2011 dari Majalah *Gatra*; *Nabil (Nation Building) Award* pada Oktober 2012, dari Yayasan Nabil, sebagai pengakuan atas perjuangan dan pemikiran dalam menegakkan Pancasila sebagai sumbangan bagi *nation building*; *Megawati Soekarnoputri Award*, pada Desember 2012, sebagai penghargaan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kemajemukan; *Penghargaan Ilmu Sosial* 2013 dari Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS); dan menerima Anugerah Kebahasaan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2014. Pada 2015, terpilih menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia; menerima Anugerah "Cendekiawan Berdedikasi" dari *Harian Kompas*; dan dinobatkan sebagai salah seorang dari "70 Tokoh Indonesia Membesarkan Negeri" , dari Fraksi Partai Nasional Demokrat.

RINGKASAN

Kesenjangan dan Kebencian dalam Relasi antar-Kelompok di Indonesia

Geger Riyanto, MA.

Forum Kajian Antropologi Indonesia

Dalam presentasi ini, saya ingin berargumentasi bahwa identitas, tradisi, atribut kultural bukanlah warisan paripurna dari masa silam. Ia merupakan representasi diri yang muncul kala satu kelompok membandingkan dirinya dan derajatnya dengan kelompok lain dalam konteks tertentu. Kebencian maupun kekerasan atas nama kebudayaan, dengan demikian, tak bisa dijelaskan semata sebagai sesuatu yang mencuat dari kepercayaan yang keliru—sebagaimana yang lazim dijelaskan sejumlah cendekiawan. Sebaliknya, ia mulus menyeruak dan memperoleh pbenarannya ketika satu kelompok merasa terancam, terkangangi oleh keberadaan yang lain. Citra kesenjangan terbukti senantiasa menjadi legitimasi ampuh dari kekerasan terhadap yang lain. Dalam hal ini, upaya mencegah konflik, kekerasan, serta intoleransi etnoreligius tak bisa semata digulirkan dengan menyemai toleransi melainkan juga memastikan keadilan sosial yang terjamin untuk pihak-pihak yang ada.

PROFIL PEMBICARA



Geger Riyanto merupakan peneliti di Forum Kajian Antropologi Indonesia. Ia juga bergiat di Koperasi Riset Purusha serta mengajar mata kuliah "Konstruktivisme" dan "Filsafat Sosial" di Universitas Indonesia. Artikel-artikelnya telah terbit di sejumlah jurnal nasional dan buku. Ia menulis secara rutin kolom di berbagai media.

Koentjaraningrat Memorial Lectures (KML) merupakan kuliah umum yang diselenggarakan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa Prof. Koentjaraningrat, perintis dan pengembang antropologi di Indonesia. Kegiatan tahunan FKAI ini dilaksanakan sejak lembaga nirlaba ini resmi berdiri pada tahun 2004. Tema yang diangkat biasanya terkait dengan masalah-masalah aktual yang tengah dihadapi bangsa.

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES

Demokrasi & Kebudayaan, 2004
Terorisme & Delusi Sosial, 2005
Integrasi Nasional & Penguatan Negara, 2006
Pembangunan Karakter Bangsa, 2007
Masalah Lingkungan & Perspektif Budaya, 2008
Realitas Sosial Budaya di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia, 2009
Keanekaragaman Makanan Indonesia & Ketahanan Pangan Nasional, 2010
Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua, 2011
Membangun Papua Melalui Pendekatan Kebudayaan, 2012
Pendidikan Nasional dan Kearifan Timur, 2013
Diponegoro & Masalah Kepemimpinan Nasional, 2014
Narkoba, Seksualitas & Politik, 2015



Achmad Fedyani Saifuddin, Jakob Oetama, PM Laksono, Ansyad Mbai, Riza Sihbudi, Eng Seng Ho, Juwono Sudarsono, Naffi Sanggenafa, Qodri Azizy, Sulaiman Mamar, Budi Susanto, Meutia Hatta Swasono, Gumilar R Somantri, Selly Riawanti, Joszh Mansoben, Emil Salim, Subur Budhisantoso, Kusnaka Adimihardja, Noke Kiroyan, Chalid Muhammad, Basuki Supartono, MayJen Syaifuddin Tippe, Suprayoga Hadi, Riwanto Tirtosudarmo, Dave Lumenta, Budi Susilo Soepandji, Franky Welirang, Edhi Martono, Zulyani Hidayah, Muridan S Widjojo, Agapitus Dumatubun, Phil Erari, Kal Muller, Mietje Rumbiak, Bambang Wibawarta, HAR Tilaar, Laurentius Dyson, Jusuf Sutanto, Tony Rudyansjah, Peter Carey, Bondan Kanumuyoso, Karsono Saputra, Sari Damar Ratri, Ignatius Praptorahardjo, Hilmar Farid, Dewi Candraningrum



Pameran Etnografi

<http://fkai.org>

1. Pameran Kebudayaan Pertanian Non Irigasi "CERITA DARI LADANG" di Atrium Grand Indonesia Shopping Town, bekerja sama dengan Pulitbang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (19-24 Agustus 2008)
2. Festival Kampung Toegoe, bekerjasama dengan Suku Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta Utara (15 November 2008)
3. Peranakan Festival di Atrium Grand Indonesia Shopping Town, bekerjasama dengan Lim & Ong Heritage Consultant di Atrium Grand Indonesia Shopping Town (9 Januari – 2 Februari 2009)
4. Pameran Foto dan Produk Kerajinan Perempuan 'Potret Perempuan Indonesia 2004-2009 Menuju Kesetaraan', di Atrium Fountain, Grand Indonesia Shopping Town. Bekerja sama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, (8-11 Oktober 2009).
5. THE DANCING PEACOCK Pameran Batik Priangan: Revitalisasi Tradisi Batik Priangan, Bentara Budaya Jakarta, 20-30 Mei 2010, Bekerjasama dengan Yayasan Batik Jawa Barat
6. Pameran Kain Tradisional Koleksi Rahmi Hatta & Raharty Subijakto: Dua Saudara Pencinta Wastra Adati Museum Tekstil, 11 April – 1 Mei 2011
7. BETAWI PUNYE GAYE, Pameran, Bincang-Bincang, Pagelaran Seni Betawi, Bentara Budaya Jakarta, 19-29 April 2012.
8. Gelar Karya Samuel Wattimena: Evolusi Tenun Maluku Tenggara Barat, Museum Tekstil 12-19 November 2014



FORUM
KAJIAN
ANTROPOLOGI
INDONESIA

Untuk Indonesia yang Multikultural



Publikasi



Refleksi Karakter Bangsa, 2008

Kumpulan Diskusi terbatas yang membahas pembangunan karakter bangsa dengan tujuh kajian ilmu, masing-masing dengan dua pembicara, dan tiga diskusi. Kajian-kajian ilmunya antara lain pendidikan, politik, sejarah, psikologi, ekonomi, ilmu komunikasi, dan humaniora. Hasil diskusinya kemudian dirangkum dan diterbitkan.

Disunting oleh Achmad Fedyani Saifuddin dan Mulyawan Karim.

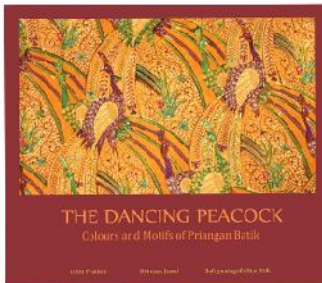
Penuis/Pembicara antara lain Ade Armando, Anhar Gonggong, Armai Arief, Asvi Warman Adam, Azyumardi Azra, Carunia M Firdausy, Djsman Simanjuntak, Donny G Adian, HAR Tilaar, Ibnu Hamad, Maswadi Rauf, Reni Akbar-Hawadi, Sartono Mukadis, Susanto Zuhdi, Robertus Robert, Zulyani Hidayah.

Perspektif Budaya:

Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures, 2009

Buku ini ingin menawarkan sesuatu dari kumpulan makalah dari lima peristiwa Koentjaraningrat Memorial Lectures yang sudah diselenggarakan antara tahun 2004-2008. Berisikan hasil pengamatan dan pernyataan para ahli dalam menanggapi masalah-masalah aktual yang dihadapi bangsa Indonesia di awal era demokrasi dan globalisasi, masa dimana Indonesia sebagai negara dan bangsa juga tengah didera krisis multidimensional antara lain karena minimnya pemahaman mengenai pentingnya perspektif budaya dalam meninjau persoalan kebangsaan.

Disurting oleh Bambang Widiyanto dan Iwan Meulia Pirous



The Dancing Peacock (Merak Ngibing)

Colours and Motifs of Priangan Batik, 2010

Berbagai peristiwa sejarah, keadaan alam, dan tata nilai sosial-budaya menjadi sumber inspirasi para pembatik Priangan untuk melahirkan berbagai ragam hias yang kaya, yang sekaligus menjadikan batik priangan memiliki kekhasan tersendiri. Warna-warna dan ragam hias batik Priangan hampir selalu menampilkan semangat kesederhanaan, apa adanya, terbuka dan komunikatif, pluralis. Secara keseluruhan, kesan yang didapat saat melihat selembar batik Priangan adalah kesan cantik-molek, bahkan sedikit genit, yang mungkin selaras dengan citra umum orang Sunda.

Ditulis oleh Dicit Pradito, Herman Jusuf, Ken Atik.

Bekerjasama dengan Yayasan Batik Jawa Barat

(Masa Penulisan) Batik Lasem, The Wisdom of Seaweed and Palm Leaves

Forum Kajian Antropologi Indonesia berencana menulis dan menerbitkan buku tentang Kota Lasem dan masyarakatnya, terutama tentang batik dan kegiatan membatik.

Tujuan umum penulisan tersebut adalah mendukung minat masyarakat pariwisata Lasem dan Batik Lasem. Namun secara khusus, buku ini juga diharapkan dapat memberi andil dalam pendidikan multikultural di mana masyarakat mampu berpedoman menghargai ragamnya budaya. Kota Kecamatan Lasem dapat dijadikan contoh sebagai kota plural dan konsistensinya dalam menjaga kebudayaan mereka.

Hal ini yang mendorong kita untuk mewujudkan Lasem sebagai heritage city.





www.fkai.org



<https://www.facebook.com/FKAI.org/>

UCAPAN TERIMAKASIH

Forum Kajian Antropologi Indonesia mengucapkan terimakasih kepada

Bapak Tony Rudyansjah, Ketua Departemen Antropologi, FISIP UI

Bapak Semiarto Aji Purwanto, Kepala Program Sarjana Antropologi, FISIP UI

Ibu Dian Sulistyawati

Ibu Suraya Afif

Bapak Dave Lumenta

Bapak Yulizar Syafri

Hempunan Mahasiswa Antropologi (He-MAn) UI

SUSUNAN PANITIA

Pembina	: Kartini Sjahrir
Pengarah	: Mulyawan Karim
Ketua Pelaksana	: Bintang Y Soepoetro
Sekretaris	: Wieke Dwiharti
Pendanaan	: Notty J Mahdi, Amalia Shadily
Persidangan	: Iwan Meulia Pirous, Geger Riyanto, Raden Hezty R., Clarisa Irene, Diah Puspitarini
Protokoler	: Betty Sitorus, Dwi Febriola, Medina Putri
Publikasi	: Elok Aisyah Kartoredjo
Konsumsi	: Diana Damayanti
Perlengkapan	: Afif Futaqi, Sipin Putra
Dokumentasi	: Dwi Fajar, Wahyu Nur Hidayat, Leny Mahromatul Ulya, Ghassani S. Prabowo

CATATAN

REVISI
2013

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 103/P/2013
Tentang
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 103/P/2013
Tentang



DIREKTORAT JENDERAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA



Didukung oleh



APEXINDO

committed to excellence